

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkotaan, sebagai sebuah wilayah tidak hanya dipandang lewat aspek fisik semata, tapi juga aspek sosio-kulturalnya. Nuansa keberagaman sosio-kultural telah sejak lama hadir dan tercipta di daerah perkotaan. Kota tidak hanya mengemukakan fenomena wilayah geografis tertentu (*place*), tapi juga seperangkat kegiatan (*work*) dan dinamika penduduk (*folk*) yang terus bergerak. Kehadiran perkotaan tidak terlepas dari gesekan-gesekan spasial. Dalam sejarahnya, selalu saja ada yang ditelikung dan didominasi, digusur dan dikonversi demi terbentuknya sistem perkotaan yang seragam (Jellinek, 1994; Murray, 1996). Mereka yang 'kalah' oleh sebuah perampasan sumberdaya dan kapabilitas senantiasa bangkit untuk terus menyusun strategi baru agar tetap bertahan hidup. Salah satu kelompok di antara mereka adalah pemulung, golongan yang dikategorisasi sebagai sekelompok kaum miskin (Berger, 1982).

Kehadiran pemulung memang bukan hal baru, tetapi ada perubahan mendasar dalam pola kehidupan mereka. Fenomena pemulung dengan membawa gerobak yang berukuran 2 x 1 meter sebagai alat produksi sekaligus tempat tinggal bersama anggota rumahtangganya saat ini semakin hari semakin marak. Meminjam istilah Twikromo (1999), mereka inilah yang disebut dengan pemulung jalanan. Pada siang hari mereka berkeliling dari tempat sampah satu ke tempat sampah yang lain. Saat malam hari mereka menempati emperan toko, pinggiran jalan, kolong jembatan dan ruang publik lainnya untuk istirahat. Harian *Kompas*¹ menggambarkan mereka layaknya kaum Gipsy yang berpindah tempat. Harian *Republika*² menyebutnya "Manusia Gerobak", yaitu sekelompok penduduk Jakarta yang menghabiskan hari-harinya di atas gerobak karena tidak memiliki tempat tinggal. Profesi mereka sebagai pemulung mengharuskan mereka

¹ Tanggal 14 Agustus 2001.

² Tanggal 21 November 2001.

setiap hari berkeliling Jakarta mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat-tempat sampah dan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak berpikir mencari kontrakan sebagai tempat tinggal, jangankan mengontrak, untuk makan sehari-hari kadang mereka mereka berutang. Lebih tragis lagi menguburkan mayat pun seperti sesuatu yang mustahil.³

Kisah-kisah mereka menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian. Studi-studi mengenai orang jalanan dominan menempatkan kemiskinan dalam hal ini ekonomi sebagai penyebab utama urbanisasi (Gilbert & Gugler, 1996). Meski para manusia gerobak identik hidup dalam kemiskinan, sementara pengaruh globalisasi menyebabkan tekanan pada kota menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Hal itu tidak menyebabkan sifat kecenderungan untuk pasrah dalam menghadapi masa depan dan menyerah pada nasib seperti yang dicirikan oleh budaya kemiskinan. Bahkan mereka lebih berani menampakkan diri dalam menjalankan aktivitas apa yang disebut Dieter-Evers (1980) sebagai ekonomi bayangan. Mereka juga tegar menghadapi tekanan-tekanan struktural negara seperti penggusuran karena kehadiran mereka dianggap sebagai sumber kekumuhan dan perusak ketentraman, sulit diatur dan hanya menjadi permasalahan bagi pemerintah kota. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan warga kota yang dominan mencitrakan negatif (Twikromo, 1999).

Sebagai subjek aktif, para manusia gerobak terus kreatif dalam melahirkan taktik-taktik baru yang mereka peroleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Taktik-taktik itu merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang dapat menghasilkan dan menguntungkan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, yakni kebutuhan hidup agar mereka tetap bertahan dalam menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah di tengah kemiskinan perkotaan. Salah satu strategi itu adalah menjadikan gerobak sebagai pusat kehidupan, sebagai tempat tinggal sekaligus alat kerja. Dengan gerobak itu, mereka dapat mengembara ke mana mereka mau, kalau pun digusur mereka tidak akan mengalami kerugian besar sebagaimana pengalaman sebelumnya. Saat pengembaraan, mereka biasanya tidur di dalam gerobak, emperan toko, kolong tol atau tempat lain yang dianggap aman dan dekat sumberdaya. Dan kenyataan, fenomena manusia

³ Tanggal 6 Juni 2005.

gerobak semakin hari semakin meramaikan sudut-sudut Jakarta. Akhirnya, semua itu menarik minat saya untuk mengkaji fenomena manusia gerobak secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang faktual.

1.2 Kerangka Konseptual

1.2.1 Kajian tentang Pemulung dan Gelandangan

Kajian ini berupaya mengurai kehidupan manusia gerobak, secara khusus membahas mengenai taktik-taktik mereka dalam bertahan hidup di tengah kemiskinan, tekanan warga dan pemerintah kota.

Dalam disiplin antropologi, kajian pemulung biasanya dikategorikan kepada studi mengenai orang jalanan. Kajian tersebut biasanya dimasukkan dalam kategori antropologi perkotaan. Perbincangan mengenai manusia gerobak dapat merujuk pada pembicaraan mengenai pemulung dan gelandangan. Bagi peneliti, manusia gerobak merupakan identitas yang dapat digunakan untuk membedakan pemulung menetap (kampung) dengan pemulung yang tidak menetap (jalanan). Namun demikian tidak semua pemulung jalanan bergerobak, dan tidak semua pemulung bergerobak juga tidak menetap. Dalam hal ini manusia gerobak adalah pemulung yang menggelandang dengan gerobak.

Menurut Onghokham (1986), istilah "gelandangan" berasal dari kata "gelandang" yang berarti "yang mengembara, yang berkelana". Istilah yang lebih netral sifatnya. Bahkan menggelandang merupakan tradisi dari komunitas tertentu. Sebab pengembaraan didasarkan pada dua alasan yakni politik dan ekonomi. Gelandangan didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak, dan makan di sembarang tempat. Bahkan Umar Kayam menyatakan bahwa pada kaum gelandangan di negeri kita, bukan mustahil lahir pula apa yang disebut "budaya gelandangan", setidaknya sub kultur gelandangan. Sebab mereka mempunyai ciri-ciri dasar yang melekat pada gelandangan sebagaimana dikatakan Wirosardjono (1986). Ciri mereka adalah mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri yang berbeda dengan lapisan masyarakat lainnya, tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan dan pendapatan yang tidak layak, serta sub kultur yang khas dan mengikat.

Kajian mengenai gelandangan dan pemukiman liar dilakukan Parsudi Suparlan (1986) di Jakarta dan Purwokerto, menyebutkan kehadiran gelandangan merupakan konsekuensi logis yang muncul akibat gangguan dan pengembangan perkotaan. Timbulnya gelandangan di perkotaan terjadi karena adanya tekanan-tekanan ekonomi dan rasa tidak aman sebagian warga desa yang kemudian terpaksa harus mencari tempat yang diduga dapat memberi kesempatan yang lebih baik di kota. Lebih lanjut dalam studinya ia membagi kondisi kehidupan dalam dua hal yaitu perumahan (sulitnya gelandangan mendapatkan perumahan, sehingga mereka memanfaatkan tanah-tanah liar sebagai pemukiman dengan mendirikan gubuk-gubuk), serta mata pencaharian (aktivitas ekonomi dilakukan dengan mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual kembali). Studi ini menunjukkan bahwa para pemulung hadir karena daya tarik kota dan ketersediaan lapangan di desa, sebagai sebuah fenomena yang wajar.

Masih serupa dengan Suparlan, Wurdjinem (2001) dalam kajian kuantitatifnya menyebutkan bahwa pemulung hadir disebabkan keterbatasan pekerjaan. Untuk bertahan hidup, pemulung menempuh interaksi sosial antar pemulung dan mengembangkan jaringan vertikal dan horizontal. Sementara, berdasarkan penelitian kuantitatif yang dilakukan Djuwendah (2000), diketahui bahwa 38% para pemulung menjalani usahanya karena tidak memerlukan modal banyak dan keahlian khusus, 29% karena tidak terikat waktu atau coba-coba, 18% merasa lebih menguntungkan dari usaha sebelumnya dan hanya 21% yang mengaku terpaksa karena sulitnya mencari pekerjaan lain. Alasan lain yang melatarbelakangi para pemulung bekerja dalam usaha ini merupakan rentetan dari keterbatasan keahlian yang dimiliki, sumberdaya modal, dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga pada akhirnya mereka memilih bekerja sebagai pemulung yang lebih mengandalkan kemauan dan kekuatan fisik. Dengan melihat keterbatasan dan motivasi tersebut, Djuwendah merekomendasikan usaha pengumpulan bahan daur ulang sampah sebagai alternatif pekerjaan yang dapat memberikan sumber penghasilan untuk menunjang kehidupan mereka. Faktor yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan pemulung sampah adalah besar kecilnya waktu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan bahan daur ulang sampah. Kendala yang dialami pemulung terutama yang berasal dari

luar kota adalah keterbatasan modal, biaya hidup dan tempat tinggal di Kota. Sedangkan kendala eksternal berupa persepsi masyarakat yang mencurigai dan menganggap pekerjaan pemulung yang kotor, hina, ilegal dan mendekati tindakan 'kriminal'.

Sementara Artijo Alkostar (1984: 120-121) melihat bahwa penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis. Artidjo (1986) dalam tulisannya yang mengacu pada penelitian di Ujungpandang dan di Yogyakarta, menyatakan bahwa cara hidup gelandangan ada yang berkelompok dan ada pula yang menyendiri. Sebagai tunawisma dan tunakarya mereka terpencil dan terpisah dari kehidupan masyarakat normal dengan aktivitas ekonomi yang dianggap kriminal. Pada praktek kehidupannya terdapat pimpinan, solidaritas, perselisihan, pertengkaran ataupun perkelahian antar gelandangan baik karena rebutan rezeki maupun kekuasaan atas tempat dan perilaku seks yang khas. Menurut Alkostar gelandangan adalah gejala sosial yang abnormal dan merupakan hasil interaksi dari kodrat manusia dengan tata sosial yang ada. Kepribadian mereka merupakan totalitas interaktif antara faktor-faktor organik, warisan sosial dan pengalaman hidup yang unik.

Lebih lanjut, Jacob Rebong, Anthony Elena dan Masmiar Mangiang (1983) memperlihatkan sepaik terjang ekonomi para gelandangan, yang ternyata tidak seburuk sebagaimana dilihat para pejabat pemerintah sebagai sampah yang mengotori keindahan kota, dan menjadi pusat tindak kejahatan. Gelandangan, dibalik semua pandangan negatif ternyata mempunyai mekanisme ekonomi sendiri yang cukup jelas dengan lapak sebagai pusatnya, yang dalam beberapa hal menguntungkan pabrik-pabrik tertentu. Bagi mereka, lapak telah mempertemukan kepentingan modal besar yang datang dari dunia industri dengan kepentingan kaum gelandangan yang menjalani hidup bebas bagaikan tanpa tujuan. Maka, keberadaan pemulung dinilai penting bagi sebuah kota. Merujuk pada Muladi (2002) para pemulung adalah pahlawan kebersihan lingkungan tanpa tanda jasa.

Terpaan terik matahari yang menyengat, bau dan kotoran dari berbagai macam sampah tanpa ada rasa jijik dan malu-malu, membalik-balik sampah guna mengumpulkan barang bekas baik kertas, kardus, besi, plastik dan lainnya yang bisa dijual. Lebih lanjut dijelaskan bahwa upah kerja para pemulung didasarkan atas jumlah dalam bentuk berat kertas dan kardus bekas yang dikumpulkan. Dalam hal ini Muladi telah sedikit memaparkan apa yang oleh Scott (2001), disebut sebagai perlawanan pemulung terhadap kelas atas. Perlawanan adalah tiap tindakan untuk melunakkan atau menolak tuntutan kelas-kelas, misalnya para pemulung sengaja menyiram kardus dengan air dengan maksud agar bertambah berat.

Berkaitan dengan perlawanan pemulung, Twikromo (1999) melakukan kajiannya dengan menekankan pada konstruksi sosial dan budaya marginalitas di kalangan pemulung jalanan (pemulung yang hidup dan tidur di jalanan) Yogyakarta. Studi ini lebih menyoroti hubungan pemulung dengan pemerintah, serta menganalisis bagaimana peraturan pemerintah kota mempengaruhi pandangan pemulung jalanan tentang realitas sosial-budaya mereka yang disertai dengan praktek perlawanan terhadap tekanan-tekanan masyarakat kota dan peraturan pemerintah.

Meski pemulung hidup bebas di jalanan, ternyata pemulung juga mampu berintegrasi dengan masyarakat. Guinness (1985) melakukan studi yang didasarkan pada survey gelandangan di Yogyakarta dengan menghimpun informasi mengenai proses integrasi gelandangan ke dalam kehidupan kota yang terbukti berhasil. Dalam proses integrasi tersebut terkadang campur tangan pemerintah tidak diperlukan. Keberhasilan integrasi tersebut ditandai dengan pembauran gelandangan ke dalam masyarakat kampung melalui berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan peningkatan pendapatan dan kedudukan hukum.

Sementara menurut negara, gelandangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Bagi negara, dalam hal ini Departemen Sosial, baik pemulung maupun gelandangan dikategorikan sebagai Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan-sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung. Bahkan dalam kasus tertentu, mereka disebut sebagai penyakit masyarakat (pekat), penyimpangan sosial yang harus ditangani secara preventif, represif, dan rehabilitatif⁴ agar kembali kepada norma dan agama yang berlaku secara umum. Konteks inilah yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di Jakarta.

Disadari penjelasan yang ada belum mencukupi untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena manusia gerobak secara memadai. Merujuk pada kajian-kajian sebelumnya setidaknya terdapat tiga hal yang patut dipertimbangkan; *pertama*, studi-studi di atas lebih dominan menggambarkan ciri dan faktor-faktor pemulung-gelandangan sebagai budaya distingtif, yang pada gilirannya secara paradigmatik pemulung bergerobak ditempatkan sebagai manusia yang pasif; *Kedua*, studi mengenai pemulung-gelandangan lebih dominan menjelaskan tentang pekerjaan yang membahayakan, kesehatan, penyakit sosial dengan praktik hidup kesehariannya yang dipandang abnormal. Dan *ketiga*, yang paling dominan adalah kajian bagaimana membuat kebijakan dan program yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan atau tidak menjadi penyakit masyarakat.

⁴ Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemis; Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat; Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia.

Sebagaimana uraian tersebut, penelitian ini melakukan kajian mengenai praktik keseharian dan taktik-taktik manusia gerobak --sebagai sesuatu yang baru, meski faktanya telah terjadi lama— dalam bertahan hidup di tengah kemiskinan perkotaan, dengan memberikan kesempatan yang besar kepada manusia gerobak untuk memberikan perspektifnya sebagai subjek yang aktif.

1.2.2 Kerangka Berfikir

Kemiskinan adalah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, dan terkadang dari ideologi yang dianut. Konsep kemiskinan yang dirumuskan pada gilirannya melahirkan atribut-atribut kemiskinan. Awalnya, atribut-atribut kemiskinan dilihat sebagai sesuatu yang absolut sebagai kondisi serba kekurangan materi. Para ilmuan kemudian membuat batas antara yang dapat disebut miskin dengan tidak miskin dengan “garis kemiskinan.”⁵ Sampai saat ini, ukuran tersebut tetap digunakan untuk menghitung jumlah dan penentuan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Atribut-atribut absolut tersebut selanjutnya dipertanyakan oleh berbagai pihak, baik “garis kemiskinan” itu sendiri,⁶ maupun atribut lain-lain yang lebih luas dari sekedar atribut ekonomi (multidimensi).⁷ Dengan demikian, atribut kemiskinan menjadi relatif berdasarkan realita empirik

⁵ Sayogjo mengukur batas kemiskinan dari tingkat penghasilan atau pengeluaran rumah tangga setara beras per kapita per tahun yaitu 480 kg untuk kota dan 320 kg untuk desa. Sementara garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pangan dan nonpangan. Sedangkan Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan penghasilan PPP US \$ 1 per hari per kapita.

⁶ Protes mengenai garis kemiskinan lebih sering disuarakan oleh golongan buruh yang menuntut kenaikan standar upah. Golongan buruh memandang standar upah minimum ditentukan oleh garis kemiskinan, namun garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah jauh dari kelayakan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

⁷ Berbagai pemikiran baru tentang kemiskinan memasukkan aspek ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan keterkucilan (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*) dan keamanan (*security*) muncul sebagai konsep yang banyak dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu juga dikembangkan pemahaman mengenai penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Ellis, 1998). Amartya Sen kemudian menekankan perlunya meningkatkan kemampuan individu yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan dalam masyarakat. Belakangan juga dimasukkannya relasi gender dalam konsep kemiskinan.

meski tanpa batas-batas yang jelas karena relativitas dinamik golongan miskin, sehingga memungkinkan akan lebih banyak orang masuk dalam kategori miskin.⁸

Atribut-atribut kemiskinan dibuat untuk mempermudah mengetahui ada dan tidaknya fenomena kemiskinan. Saat kemiskinan dianggap ada, lalu dipandang sebagai masalah dan kemudian akan ditanggulangi oleh berbagai pihak. Penanggulangan kemiskinan bukan pada penghilangan atribut-atribut kemiskinan --karena atribut-atribut itu bersifat relatif, meski ada yang (di)absolut(kan)--, melainkan menemukan sebab-sebab bagaimana atribut-atribut itu hadir. Pemahaman mengenai penyebab kemiskinan inilah yang pada akhirnya menentukan keberhasilan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan.

Dalam ilmu sosial, sebab-sebab kemiskinan secara dominan dipengaruhi oleh dua pendekatan besar, yaitu budaya kemiskinan dan kemiskinan struktural. Pendekatan budaya kemiskinan sangat dipengaruhi oleh Lewis (1988), yang memandang bahwa kebudayaan menyebabkan sekaligus memantapkan kemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan merupakan cara hidup yang tidak hanya dikembangkan oleh golongan miskin, tetapi juga ditransmisikan dari generasi ke generasi. Pada cara hidup, golongan miskin dipandang sebagai satuan sosial yang diskret, menyandang suatu kebudayaan kemiskinan yang khas, yang berbeda dari masyarakat lain di luarnya. Perbedaan budaya itu pada gilirannya menjadikan orang miskin tidak mampu berintegrasi dengan masyarakat yang lebih luas, yang pada tahap selanjutnya mereka mengembangkan seperangkat *coping mechanism* yang dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif seperti kehidupan yang kacau, hilangnya masa kanak-kanak dalam siklus kehidupan orang miskin, maraknya gejala hidup bersama tanpa menikah, maraknya gejala tindak kriminal dan banyaknya anak-anak yang ditinggalkan orang tua. Pada situasi itu, orang miskin dicirikan dengan atribut-atribut khusus, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan. (Lewis, 1988).

⁸ Hasil Kajian Kemiskinan Bersama Komunitas di Kendari menunjukkan jumlah golongan miskin lebih banyak jika dibandingkan data Badan Pusat Statistik. Lihat GAPRI, 2007.

Pendekatan kebudayaan kemiskinan yang dikembangkan Lewis memiliki andil dalam mengungkap penyebab kemiskinan, namun konsep itu tidak sepenuhnya dapat menjelaskan penyebab kemiskinan yang terjadi pada golongan miskin. Kelemahan konsep budaya kemiskinan karena anti sejarah dan mengesampingkan asal-usul kelakuan dan norma-norma yang ada (Gans, 1984 [dalam Baker 1980: 6]). Konsep itu sangat normatif dan hanya merupakan kecurigaan dan prasangka buruk golongan atas terhadap golongan miskin. Padahal bukti empiris menunjukkan bahwa orang miskin adalah pekerja keras, mempunyai aspirasi dan motivasi untuk memperbaiki nasib. Mereka mampu menciptakan pekerjaan sendiri serta bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup (Papanek dan Kuncorojakti, 1986). Di samping itu, mereka juga berusaha merubah nasib dengan cara beralih dari satu usaha ke usaha lainnya dan tidak mengenal putus asa. Bahkan kehadiran mereka di kota mempunyai andil dalam menopang kehidupan di kota (Suparlan, 1993). Melalui kegiatannya, mereka memberikan peluang bagi warga kota menikmati pelayanan yang murah. Kenyataan ini merupakan bukti bahwa kaum miskin tidak seperti digambarkan oleh Lewis dalam kebudayaan kemiskinan. Sehingga kemiskinan dengan demikian lebih dominan berwajah struktural.

Kemiskinan struktural menurut Alfian (1980:5) didefinisikan sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu, tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Pendekatan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa meskipun sumberdaya yang cukup besar telah disalurkan ke sektor-sektor yang didominasi golongan miskin. Namun golongan miskin tidak mendapat keuntungan dari sumber daya tersebut karena adanya struktur yang menjadi penghalang. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur kekuasaan dan tata pemerintahan, serta struktur sosial lebih luas yang menyebabkan terjadinya ketimpangan, ketersisihan dan hilangnya kapabilitas seseorang untuk mendapatkan sumberdaya yang ada. Struktur-struktur yang ada dianggap telah merampas daya sosial, budaya, ekonomi dan politik sekelompok orang (GAPRI, 2005), mengungkung dan menghalangi golongan miskin untuk maju, yang kemudian diberi atribut sebagai golongan yang tidak berdaya.

Menurut Saifuddin (2007), meskipun kedua pendekatan ini memiliki penekanan yang berbeda --kebudayaan dan struktur sosial dalam tulisan ini adalah dua dimensi analisis yang berbeda--, keduanya berada dalam ruang paradigma struktural-fungsionalisme. Struktur-fungsionalis memandang bahwa fungsi adalah tugas sosial, suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu (Saifuddin, 2005: 159). Setiap individu menempati status yang menjadi posisinya, maka kemiskinan merupakan tugas yang harus diemban karena struktur-struktur yang ada adalah baik dan ideal. Walaupun merespon, berada dalam bentuk yang kira-kira seperti robot terhadap tekanan struktural (Saifuddin, 2005: 163). Kedua pendekatan ini memandang masyarakat (miskin) sebagai suatu kesatuan sosial yang secara budaya khas, tunggal, dan memiliki batas-batas tegas (*culturally distinctive*). Dengan kata lain, "orang miskin" dalam kedua pendekatan kemiskinan ini dilihat sebagai objek statis dan tidak berdaya, baik sebagai sasaran penelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan. Menurut Kieffer (1984: 9 [dalam Soeharto, 1977: 212-213]), ketidakberdayaan ini merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungannya yang meliputi kombinasi antara sikap penyalahan-diri sendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik. Dengan demikian orang miskin baik akibat kebudayaan dan struktural adalah sama, statis = ketidakberdayaan. Merujuk pada Black (dalam Gardner dan Lewis, 2005: 192) Pemberdayaan dilukiskan sebagai ihwal "mengasuh, memerdekakan dan bahkan memberi tenaga kepada kaum miskin dan tidak berdaya". Konsekuensi dari kedua pendekatan ini, menjadikan tindakan yang ada belum mampu menjawab persoalan, karena lebih didominasi semangat belas kasihan, perbaikan perilaku dan budaya melalui pelatihan-pelatihan, pengusuran dan pengusiran orang miskin.

Selanjutnya, cara pandang terhadap orang miskin sebagai orang yang tidak berdaya, lemah, dan apatis karena mereka memiliki kebudayaan kemiskinan, juga karena mereka terkungkung dan terkurung oleh kendala-kendala struktural yang datang dari luar diri mereka. Kedua Pendekatan ini memandang bahwa golongan miskin tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan kebudayaan dan struktur sosial. Kegiatan manusia dipandang terhambat sedemikian jauhnya, hingga tidak ada

ruang bagi pilihan yang dilakukan secara sadar, yang ada hanyalah pilihan tunggal. Orang miskin hanya pelaku sosial pasif yang hanya menyerahkan kepada perbudakan ekonomi dan politik. Tindakan sosial orang miskin dibentuk dan diatur oleh struktur-struktur raksasa yang pada umumnya tak memperdulikan pilihan-pilihan secara eksplisit. Merujuk pada Soedjatmoko, (1980: 47) orang miskin seperti seseorang yang lahir dalam berbagai struktur sosial, dan atas kekuatan sendiri ia tak mampu untuk menguasai atau mengubah struktur.

Kenyataan dari dua pendekatan di atas, pada gilirannya membuat pertanyaan di mana sebenarnya posisi orang miskin sebagai subjek yang aktif. Padahal manusia adalah pelaku yang aktif, kreatif, dan bahkan manipulatif dalam menghadapi lingkungannya (Saifuddin, 2005:176). Dan tingkat kemampuan orang untuk membentuk dan mengubah lingkungan merupakan persoalan empiris dan analitis. Kedua pendekatan di atas seperti tidak peduli akan berapa jauhnya kaum miskin sebagai para pelaku sosial berjuang untuk mempertahankan hidup dengan kekuasaan yang mereka miliki. Adalah Nancy S. Hughes (1992) mencoba menjembatani posisi orang miskin di antara determinasi budaya dan dominasi struktur melalui penelitiannya di Alto de Cruzeiro, Brasil. Hughes berpendapat bahwa orang miskin maupun orang yang tidak miskin memiliki kapasitas dan potensi untuk mengembangkan strategi-strategi kreatif maupun manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Dengan menggunakan kasus kemiskinan perkotaan, ditunjukkan bahwa sukar membuat garis tegas batas-batas antara kedua golongan tersebut, terlebih populasi orang miskin di perkotaan Brasil sangat besar.

Dalam penelitiannya, Hughes berupaya mengungkapkan kemiskinan menurut apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas empirik. Orang miskin diposisikan sebagai subjek yang berpikir dan bertindak, mengembangkan taktik-taktik agar bertahan hidup. Bagi Hughes, praktik kehidupan keseharian dari orang miskin (di Alto de Cruzeiro) tidak bisa dikatakan sebagai sebuah budaya kemiskinan yang terberi begitu saja, tetapi itu merupakan praktik kehidupan keseharian sebagai usaha paling optimal dari kondisi masyarakat yang sedemikian rupa. Apalagi penderitaan yang dialami oleh masyarakat miskin melalui sejarah yang panjang melalui perlawanan bersenjata. Hughes memaparkan betapa setiap

upaya masyarakat miskin untuk keluar dari situasi itu ternyata justru dicerai.⁹ Pengalaman itu menjadikan orang miskin pesimis terhadap tawaran revolusioner, yang pada gilirannya akan memperkenalkan dan mengembangkan cara-cara baru sebagai sesuatu kekuatan konkrit untuk mengubah kondisi. Dalam arti ini pemikiran Weber tentang ide sebagai kekuatan adalah benar. Ide itu sendiri juga mengubah dirinya melalui proses tindakan. Melalui pengalaman-pengalaman kaum miskin mendapatkan ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan baru, menemukan bentuk-bentuk dan elemen baru di bidang materi, sosial dan kultural. Hal-hal baru itu pada gilirannya dipraktikkan atau mempengaruhi tindakan, maka terbukalah panggung untuk belajar lebih jauh. Seperti ditunjukkan Hughes, orang miskin kemudian melakukan apapun untuk bertahan, termasuk dengan humor, misalnya humor mengenai proyek saluran air yang gagal dengan mengatakan "kita tidak akan cukup makan jika proyek ini berhasil". Setiap bantuan bagi mereka tidak pernah berarti sehingga terkadang kebuisan adalah sesuatu yang bisa melindungi mereka. Mereka sepertinya memaklumi para penjahat politik-ekonomi.

Menurut Hughes, memposisikan orang miskin sebagai subjek berarti, menerima kekuasaan, agensi, pilihan dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dari subjek tertindas, seseorang harus memulai meyakini kemampuan kelompok tertindas secara moral untuk merasionalisasi, berkolusi, mengkolaborasi "kesadaran palsu," dan lebih dari sekedar kelumpuhan kehendak. Dan upaya memahami bentuk-bentuk perlawanan keseharian dalam taktik dan praktik kaum lemah seperti yang dipaparkan oleh Michel de Certeau, dan James Scott, merupakan resiko meromantisir manusia yang menderita, tapi apakah kemudian akan mengabaikan efeknya terhadap ruh, kesadaran dan kehendak orang miskin. Dalam konteks ini (dalam kehidupan yang terkungkung) Hughes mendapati manusia yang dapat bertahan dalam kesulitan untuk merayakan bersama mereka dengan kegembiraan, penuh pengharapan, meski dalam kondisi ketidakpastian (1992: 533).

⁹ Gerakan keagamaan kaum miskin senantiasa dihentikan oleh godaan politik. Sedangkan gerakan tani yang semula dibentuk oleh aktivis marxist yang pada saat 'mampir' ke tempat tersebut justru merasa dikelabui oleh pendiri yang kembali ke tempat asalnya. Tentu saja sang aktivis sudah tidak lagi mengurusinya karena menurut rumor ia menjadi konsultan pemilik kebun tebu dan penggilingan tebu.

Hughes mengungkapkan bagaimana orang miskin memberikan makna pada kondisi-kondisi yang dialami, misalnya *mata*, memaknai *rua* sebagai tempat hidup bebas dari perintah patron, sehingga harus ke sana untuk hidup sebagai *rural migran* secara otonom, setara, bebas dari perintah. Makna juga diberikan terhadap perkawinan dari sakral menjadi lebih rasional, memiliki fungsi ekonomi usaha mendapatkan makan gratis yang layak dibanding apa yang tidak tersedia. Karena perkawinan mempertimbangkan ekonomi, maka perempuan miskin menjadi lumrah berkali-kali menikah sebagaimana yang dipraktikkan Lordes, ia berhenti menikah setelah menemukan suami yang memiliki gaji dan pensiun cukup, sebagai jaminan kelayakan hidupnya.

Hughes juga menampilkan bagaimana orang miskin menjalin hubungan-hubungan baik dengan kerabat dan non kerabat sebagai bagian dari upaya bertahan hidup. Hubungan itu penting karena sumberdaya yang ada diperebutkan oleh kelas-kelas yang ada.¹⁰ Hubungan-hubungan sosial yang terbangun antar aktor pada dasarnya adalah hubungan atas dasar kepentingan, yakni ekonomi. Hubungan kekerabatan berfungsi ekonomi yaitu digunakan sebagai upaya berbagi kemiskinan yang dihadapi, misal pada kasus kekerabatan fiktif, atau berbagi informasi tentang pekerjaan. Praktik-praktik seperti menitipkan anak kepada kerabat maupun non kerabat; memelihara hubungan baik dengan majikan, bos, *casa* pada gilirannya akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti berobat tanpa biaya, anak aman dalam pekerjaannya; termasuk kerja-kerja serabutan merupakan taktik-taktik yang dikembangkan untuk mempertahankan hidup. Menurut Saifuddin (2007), hubungan-hubungan sosial tersebut bersifat adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin meningkat baik lokal maupun nasional. Lebih lanjut dikatakan, proses adaptasi berjangka panjang ini mengakibatkan terwujudnya golongan miskin di kota, yang secara dominan bersifat massal, konservatif, dan berorientasi ke dalam – bukan mengembangkan reaksi keluar, misalnya secara masif menentang kebijakan ekonomi pemerintah.

¹⁰ Hughes mengkategorisasi kelas-kelas yang ada, yaitu *The casa*, mereka adalah kelas elite; *The rua*, mereka yang hidup di perkotaan, hidup dalam sektor industri, buruh, pekerja seks, mereka yang hidup di 'jalanan'; *The mata*, mereka yang hidup di hutan, pedesaan, yang sebenarnya hidup tergantung pada perkebunan tebu.

Pada bagian lain Hughes menampilkan kekerasan dalam praktik keseharian orang miskin. Pembunuhan, penghilangan orang, penjualan organ tubuh, penculikan adalah hal yang dialami sehari-hari. Kekerasan muncul dari institusi negara, termasuk dalam hal ini institusi keamanan dan penegak hukum. Institusi ini terus-menerus melakukan teror ketakutan kepada masyarakat miskin. Negara juga mengontrol secara ketat masyarakat miskin, melalui penahanan, interogasi, penjara, penghilangan orang, mutilasi, dan bahkan pembunuhan. Namun kekerasan yang dipraktikkan negara melalui aparatnya bukanlah sesuatu yang maha kuat sebagaimana yang dibayangkan. Menurut Hughes, aturan dan struktur bukan merupakan nilai yang tetap atau sesuatu yang tidak dapat ditembus, melainkan menjadi sesuatu yang selalu dapat diterobos melalui beragam cara, misalnya hubungan antara si pelaku kriminal dan penjaga penjara yang berkolusi membebaskan pelaku kriminal.

Dalam hal di atas, bagi orang miskin, keadaan materi, dan lembaga dan kultur dipandang sebagai faktor penghambat, namun di sana ada fleksibilitas struktur yang membuka peluang bagi golongan miskin untuk bertindak dan melalui tindakan strukturisasi itu mereka mempertahankan atau mengubah sistem tempat mereka bertindak dan berinteraksi. Golongan miskin menyerap dan menata informasi, mempertimbangkan, membuat keputusan dan bertindak berdasarkan kepentingan mereka. Pada saat bersamaan, golongan miskin juga menginterpretasikan norma, aturan dan situasi dengan cara yang baru dan yang tak pernah diduga. Hal ini menunjukkan bahwa orang miskin pada dasarnya memiliki kekuasaan, yaitu kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi aktivitas sosial yang akan menguntungkan kepentingan orang miskin, dengan cara memanipulasi atau mengubah aturan permainan dan kesempatan-kesempatan bertindak. Dengan kata lain, kaum miskin dapat berbuat lebih dari sekedar merespon tekanan sosiokultural, di mana struktur sosial sebagai cair dan berubah, dan individu secara konstan berkompetisi dan memperebutkan sumberdaya yang terbatas untuk kepentingan sendiri dan selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan (Saifuddin, 2005: 177).

Kaum miskin dengan memanfaatkan fleksibilitas struktur dan adaptasi internal pada gilirannya menjadikan keterjalinan hubungan-hubungan sosial yang

khas ini menjadi suatu integrasi sosial orang miskin dan tidak miskin, sehingga batas-batas golongan miskin yang diasumsikan dalam pendekatan kebudayaan dan struktural di atas menjadi kabur. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa orang miskin di perkotaan tidaklah terisolir dari lingkungan mereka yang lebih luas, yakni suatu jaringan sosial yang berusaha memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi yang mendasar, bukan kelompok sosial yang memiliki ciri distingtif (Saifuddin, 2007).

Akhirnya, bagi Hughes kemiskinan adalah praktik kehidupan sehari-hari orang miskin, yang turut serta mengkonstruksi makna kemiskinan berdasarkan kehendak mereka. Subjek mengetahui diri melalui refleksi atas tindakannya sendiri di dunia yang bukan semata-mata pengalaman, melainkan juga tindakan yang disengaja (Saifuddin, 2005: 284). Dalam hal ini, orang miskin menggunakan kemiskinan yang mereka maknai sebagai taktik-taktik mempertahankan hidup melalui pembenaran-pembenaran terhadap pandangan hidup mereka. Pada situasi inilah, orang miskin dan yang tidak miskin memiliki batas-batas yang tegas satu sama lain, melainkan ada hubungan interaksi yang intensif satu sama lain dalam konteks-konteks tertentu di mana kepentingan-kepentingan khusus mengikat kedua belah pihak, membangun kerjasama, mewujudkan integrasi sosial di antara keduanya, sehingga mempertahankan hidup di perkotaan pada dasarnya melibatkan hubungan sosial yang lebih luas, berbeda sebagaimana diasumsikan oleh pendekatan kebudayaan dan struktural, inilah pendekatan kemiskinan sebagai proses (Saifuddin, 2007).

1.2.3 Keterkaitan Teori Dengan Fenomena

Melihat fenomena manusia gerobak dengan menggunakan gagasan Hughes mengenai kemiskinan kota, berarti memandang manusia gerobak tidak memiliki budaya distingtif sebagaimana diasumsikan pendekatan budaya kemiskinan dan kemiskinan struktural. Sekaligus memposisikan manusia gerobak sebagai subjek yang aktif, melalui praktik sosial keseharian, mereka berupaya bertahan hidup melalui taktik-taktik yang mereka kembangkan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa struktur sosial yang tercipta melalui aktivitas aktor-aktor sosial lain telah memberikan 'pembatasan' bagi manusia gerobak untuk mampu bertindak ke luar. Namun sebagai subjek yang aktif, pemulung bergerobak tetap menghadirkan tindakan-tindakan berdasarkan pengalaman dalam rangka 'melawan' budaya dan struktur yang ada demi kelangsungan hidup.

Uraian singkat ini menyiratkan bahwa dalam masalah manusia gerobak di Jatinegara, kajian yang mendalam mengenai praktik sosial keseharian mereka seharusnya ditujukan untuk memahami taktik-taktik mereka dengan memberi porsi yang signifikan kepada mereka dalam memaknai kemiskinan di perkotaan.

1.3 Permasalahan Penelitian

Dengan mempertimbangkan perbincangan mengenai pemulung-gelandangan di atas, maka studi ini akan menempatkan manusia gerobak sebagai subjek, di mana posisi orang miskin maupun orang yang tidak miskin sama-sama memiliki kapasitas dan potensi untuk mengembangkan taktik-taktik kreatif maupun manipulatif dalam menghadapi kondisinya, sehingga batas antara manusia gerobak dengan orang lain menjadi baur. Hal ini jelas berbeda dengan cara pandang terhadap golongan miskin sebagai orang yang tidak berdaya, lemah, dan apatis karena mereka memiliki kebudayaan kemiskinan, juga orang miskin dipandang sebagai tidak berdaya, lemah, dan apatis karena mereka terkungkung dan terkurung oleh kendala-kendala struktural yang datang dari luar diri mereka. Kedua pendekatan tersebut bekerja pada paradigma struktural-fungsionalisme, konsekuensinya baik kebudayaan kemiskinan dan kemiskinan struktural sama-sama memandang golongan miskin sebagai suatu kesatuan sosial yang secara budaya khas, tunggal, dan memiliki batas-batas yang tegas.

Dalam penelitian ini, saya mengajukan pertanyaan utama yang ingin dijawab, yaitu :

1. Mengapa mereka menjadi pemulung bergerobak?
2. Taktik-taktik adaptif apa yang dibangun dan dikembangkan di tengah kemiskinan perkotaan?

1.4 Penjelasan Konsep-Konsep

1.4.1 Konsep Pemulung dan Gelandangan

Pemulung adalah seseorang atau rumahtangga yang bekerja mengumpulkan barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan baik untuk dijual maupun dimanfaatkan sendiri. Secara umum, pemulung terbagi dalam dua kategori, yaitu *pertama*, pemulung menetap, yakni pemulung yang mempunyai tempat tinggal; dan *kedua* pemulung gelandangan, yakni pemulung yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pemulung gelandangan dapat dikategori menjadi dua, yaitu pemulung yang tidak menggunakan gerobak; dan pemulung yang menggunakan gerobak, dalam studi ini selanjutnya disebut manusia gerobak.

Sementara yang dimaksud dengan gelandangan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Berdasarkan definisi ini gelandangan dapat dialamatkan kepada siapa saja yang hidup di jalan. Sebenarnya, pemulung seharusnya tidak dikategorikan sebagai gelandangan karena memiliki pekerjaan, yaitu mengumpulkan barang bekas.

1.4.2 Konsep Manusia Gerobak

Manusia gerobak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai seseorang atau rumahtangga yang bekerja sebagai pemulung yang hidup menggelandang dan menjadikan gerobak sebagai pusat kehidupan kesehariannya, baik sebagai alat kerja, tempat tidur, dan menjadi lemari penyimpanan barang-barang yang mereka miliki. Namun demikian yang dimaksud sebagai tempat tidur di sini tidak peneliti acu secara ketat karena setahu saya manusia gerobak kadang tidur di gerobak, pada saat yang lain tidur di emperen toko, kolong tol, kolong jembatan dan stasiun dan tempat-tempat lain yang dianggap nyaman. Demikian pula sebagai alat kerja,

meski mereka memiliki gerobak kadang mereka tidak menggunakannya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian manusia gerobak ini memiliki sifat empirik dan teoritik. Pada tingkat empirik, penelitian ini ditujukan untuk merekam gambaran dan kehidupan dari suatu golongan masyarakat miskin di perkotaan, yaitu manusia gerobak. Rekaman etnografis diarahkan pada konstruksi kebudayaan manusia gerobak terutama pada pandangan mereka mengenai kemiskinan dan taktik-taktik mereka dalam mempertahankan hidup di perkotaan.

Dari sisi teoritik, penelitian ini mencoba menerapkan satu perspektif antropologis mengenai bagaimana pemulung bergerobak memposisikan diri sebagai subjek aktif dalam melakukan tindakan-tindakan strategis dalam mempertahankan hidup, yang berbeda dengan posisi objek dalam pendekatan kemiskinan dan kemiskinan struktural.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk membantu memahami secara lebih mendalam dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa, latar belakang pemikiran manusia gerobak yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana mereka meletakkan makna pada peristiwa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang didefinisikan sebagai:

“...sebuah proses memahami masalah sosial atau sosial, berdasarkan bangunan yang kompleks, gambaran holistik, dibentuk melalui kata-kata, dilaporkan dengan informasi rinci, dan dilakukan pada sebuah konteks yang alamiah” (Cresswell, 1994:2)

Pendekatan kualitatif dipilih dalam rangka menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subjektif, dalam arti peneliti sangat menghargai dan memperhatikan pandangan subjektif setiap subjek yang ditelitinya. Pendekatan kualitatif selalu berusaha memahami pemaknaan individu (*subjective meaning*) dari subjek yang ditelitinya. Karena itu, peneliti melakukan interaksi atau komunikasi yang intensif dengan pihak yang diteliti, termasuk di dalamnya peneliti harus mampu memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan analisis terhadap proses-proses sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang diteliti (Creswell, 1994; 157-159). Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Strauss dan Corbin (1990), bahwa hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi proses dan mekanisme perubahan, terutama dalam konteks historis, baik pada dimensi kultural maupun sosial.

1.6.2 Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini didasarkan pada bagaimana menemukan subjek yang tepat bagi penelitian etnografi, yaitu subjek yang dapat bercerita secara mudah, paham terhadap informasi yang dibutuhkan, dan dengan gembira memberikan informasi kepada peneliti, termasuk berkenan memperkenalkan peneliti dengan subjek-subjek lain. Namun demikian diakui bahwa menemukan informan seperti ini bukan hal yang mudah. Ada kesulitan sendiri bagi peneliti untuk membanding-bandingkan kapasitas mereka dalam memberikan informasi meski dengan beberapa pertimbangan.

Informan dalam penelitian ini adalah rumahtangga manusia gerobak yang berlokasi tinggal di Jatinegara. Mereka umumnya tersebar di beberapa titik manusia gerobak tinggal. Peneliti sengaja tidak memfokuskan pada informan dalam satu kawasan dengan maksud menangkap keragaman yang ada. Selain itu, informasi juga diperoleh dari anggota komunitas lain seperti pemulung bergerobak yang tidak menggelandang, petugas kebersihan rukun tetangga dan pemilik lapak, serta pemilik warung nasi dan rokok.

1.6.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan tahap untuk menulis etnografi manusia gerobak. Etnografi diartikan sebagai paparan deskripsi detail yang holistik dan menganalisis budaya berbasis penelitian lapangan yang intensif. Dalam konsep klasik, peneliti terlibat dalam kehidupan subjek yang ditelitinya dalam periode waktu tertentu, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Hammersley and Atkinson, 1983: 2). Tujuannya adalah untuk memproduksi apa yang disebut oleh Geertz (1992) sebagai “deskripsi mendalam” dari keragaman struktur konseptual yang kompleks, termasuk apa yang tidak dikatakan atau yang diasumsikan seperti apa adanya. Etnografi dengan demikian terpusat pada detail kehidupan yang terkait erat dengan proses sosial yang meluas.

Konsekuensi penelitian ini, seperti saran Hammersley dan Atkinson bahwa dalam penelitian ini saya menjadi bagian dari dunia sosial manusia gerobak. Dan hal ini tentu saja membawa implikasi-implikasi terhadap praktik penelitian. Saya sadar bahwa saya merupakan bagian dari alat penelitian. Dalam pengumpulan data saya merujuk apa yang disampaikan Cresswell (1994: 150-151) di mana terdapat 4 (empat) macam tipe pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumen, dan alat-alat audiovisual. Tetapi pada penelitian ini peneliti hanya akan melaksanakan tiga tipe pengumpulan data, yaitu:

Pertama, saya melakukan partisipasi observasi baik yang pasif maupun aktif. Partisipasi pasif di sini saya pahami sebagai proses pengamatan dengan meminimalkan interaksi. Partisipasi pasif saya pilih untuk mengenali lingkungan manusia gerobak. Dengan interaksi pasif ini, saya dapat menangkap secara lebih baik interaksi sesama manusia gerobak melalui gerak-geriknya atau manusia gerobak dengan penghuni, pengguna jalan, dan pihak lain yang berinteraksi. Sekaligus mendengarkan apa yang mereka katakan, dengan tujuan mengetahui apa saja yang mereka anggap penting secara lebih mendalam. Dalam hal ini, saya juga mengikuti manusia gerobak dalam menjalankan aktivitasnya. Teknik pelibatan diri juga memudahkan peneliti untuk melakukan observasi terhadap keseharian manusia gerobak. Pengamatan yang peneliti lakukan setidaknya telah

mendapatkan data tentang 1) kondisi lokasi tempat tinggal, 2) gerobak yang selalu mereka bawa kemana-mana, hubungan sosial sesama pemulung, rumahtangga, lapak, dan penduduk sekitar, dan 3) lokasi kerja beserta lingkungannya.

Kedua, karena tidak semua kegiatan manusia gerobak dapat ditangkap melalui pengamatan terlibat, maka saya juga melakukan wawancara, terutama wawancara tanpa struktur. Artinya pertanyaan saya ajukan sambil lalu dan bisa berpindah dari satu topik ke topik lainnya. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak bergantung pada pedoman wawancara (sesuai teks, draft pertanyaan), tetapi menyesuaikan dengan proses jalannya wawancara, pertanyaan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara. Model ini ditempuh guna mendalami situasi dan kondisi, serta lebih memperhatikan aspek informan agar dapat mengetahui informasi yang diperlukan, peneliti tidak terpaku pada draft pertanyaan penelitian, melainkan memperhatikan sifat dan ciri unik dari informan saat wawancara. Dengan begitu, wawancara lebih terkesan sebagai 'obrolan biasa', sambil bercanda, makan dan atau merokok bersama, ketimbang mencerca informan dengan pertanyaan seperti wartawan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui *life history* para manusia gerobak di Jatinegara, hubungan sosial dalam rumah tangga, komunitas serta, penghayatan dan aspirasinya. Selain mewawancarai manusia gerobak, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan komunitas lain, seperti pemulung bergerobak, pemilik lapak, dan pemilik warung.

Ketiga, selain pengamatan dan wawancara, peneliti berusaha mengenali dan memahami bahasa manusia gerobak (secara umum pemulung-gelandangan) dengan memanfaatkan dan membaca dokumen-dokumen dan informasi terkait yang dihasilkan oleh orang lain. Teknik dokumentasi yang berupa catatan-catatan tertulis cukup penting dalam proses penelitian, untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2001: 161) karena dokumen-dokumen tersebut merupakan sumber yang stabil, kaya, dan memotivasi, sifatnya alamiah, kontekstual, tidak reaktif, mampu menghasilkan kajian isi yang akan membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

1.6.4 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian manusia gerobak ini berlokasi di wilayah kecamatan Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur, yang mengambil *setting* di pinggir-pinggir jalan, kolong tol, sekitar kontainer, stasiun dan pasar dimana manusia gerobak menempati lokasi-lokasi yang berada di wilayah tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, lokasi tinggal manusia gerobak tersebar di banyak lokasi. Sehingga lokasi penelitian ini tidak hanya dalam satu kelurahan atau kawasan, melainkan lintas kelurahan dan kawasan untuk menangkap variasi pengalaman manusia gerobak. (lihat gambar.1 lokasi penelitian pada halaman 26).

Penelitian ini mulai dilaksanakan sejak pertengahan Desember 2007 dan menurun intensitas lapangan pada akhir bulan Maret 2008. Pada bulan pertama, peneliti lebih banyak melakukan pendekatan dan pengenalan kepada manusia gerobak. Pendekatan awal ini dilakukan dengan menyaksikan manusia gerobak di beberapa tempat sambil mengenali kerja-kerja mereka. Selain itu peneliti juga melakukan pemetaan awal sebelum menentukan informan di lokasi-lokasi tertentu. Diakui ada kesulitan tersendiri dalam mengamati mereka karena ketidakpastian kehadiran pada waktu-waktu tertentu.

Pengambilan data dilakukan di lokasi tinggal dan lokasi kerja manusia gerobak. Pengambilan data di lokasi tinggal dilakukan dengan mendatangi manusia gerobak pada saat-saat hari mulai malam. Awalnya peneliti agak khawatir *dicuekin* atau akan memberikan sesuatu. Maklum selama saya mengamati, tidak ada seorang pun yang menyapa atau mengajak bicara mereka. Ternyata mereka menerima saya dengan ramah meski sedang istirahat saat memulung malam. Selain pada lokasi tinggal, pengumpulan data juga dilakukan dengan turut serta saat memulung dilakukan. Meski tidak seharian penuh, peneliti merasakan betul bagaimana lelahnya bekerja mengumpulkan barang bekas dengan berjalan kaki, makan di sekitar bau sampah yang menyengat. Selain itu, peneliti juga pernah mendatangi kantor kecamatan untuk mengetahui gambaran awal manusia gerobak. Saat itu, Pak Camat sedang tidak ada di tempat. Saya pun diterima oleh petugas yang menyuruh saya menyerahkan surat izin dari propinsi. Meski sudah ada proposal penelitian, peneliti mengeluarkan kartu mahasiswa

untuk meyakinkan, dan ternyata tidak mampu juga. Petugas itu hanya mengatakan kalau di kecamatan tidak ada data pemulung karena mereka dianggap ilegal.

Data yang diperoleh melalui wawancara berjumlah 12 rumah tangga, namun yang berhasil diwawancarai cukup mendalam hanya 7 rumah tangga, 2 orang lapak, dan 2 pemilik warung, dan 4 orang pemulung yang tidak dengan istri, dan 1 orang petugas kebersihan RT.

Tabel 1. Nama-Nama Informan Penelitian

Rumah Tangga	Nama Suami, Istri dan Anak	Umur	Asal Daerah	Mulai Memulung	Lokasi Tinggal
Rumah Tangga 1	Gepeng	48	Bogor	1998	Jl. Jatinegara Barat
	Jamilah	40	Kp Pulo	2004	
	Nablla	4,5			
Rumah Tangga 2	Udin	25	Indramayu	2004	Jembatan Item
	Anik	20	Blok M		
	Reza				
Rumah Tangga 3	Slamet	40	Tegal	1998	Jl. Jatinegara Timur II
	Ratna	41	Bekasi	1999	
	Ahmad Manggara	3,5			
Rumah Tangga 4	Hasyim	58	Purwokerto	2005	Jembatan Item
	Halimah	55	Cikampek		
	Kartini (dititipkan)	6			
Rumah Tangga 5	Muhammad	55	Semarang	2003	Jl. Jatinegara Timur II
	Asih	55	Semarang		
	Arif	6			
Rumah Tangga 6	Asep	25	Indramayu	2006	Pasar Jatinegara
	Endang	18	Indramayu		
	Resti	2			
Rumah Tangga 7	Mus	45	Semarang	2005	Jl. Jatinegara Timur II
	Ati Kerling	40	Wonosobo		
Rumah Tangga 8	Amat	55	Purbalingga	2005	Staslun Jatinegara
	Hatijah	40	Purbalingga		
Rumah Tangga 9	Agus	50	Malang	2000	Pasar Jatinegara
	Rini	50	Malang		
Rumah Tangga 10	Romlah	38	Bogor	2005	Jembatan Item
	Agus	36	Semarang	2005	
Rumah Tangga 11	Muji	37	Semarang	2002	Kolong Tol Cawang
	Dani	45			
Rumah Tangga 12	Agus	48	Bogor	2004	RSIA Hermina
	Mama	50	Karawang	1999	
Lapak 1	Aji	54	Malang	1998	Jembatan Item
Lapak 2	Waji	55	Surabaya	1996	Samping GOR Jaktim
Warung Nasi	Iis	51	Sukabumi		Pasar Jatinegara
Warung Rokok	Nenek	64	Betawi		Pasar Jatinegara
Informan lainnya	Idris	29	Pekalongan	1987	Otista
	Mustafa	81	Madiun	2004	Otista
	Sutawan	40	Malang	2000	Otista
	Agus	48	Surabaya	2005	Pasar Jatinegara
	Usman	50	Otista		Otista

Sumber: Hasil Wawancara

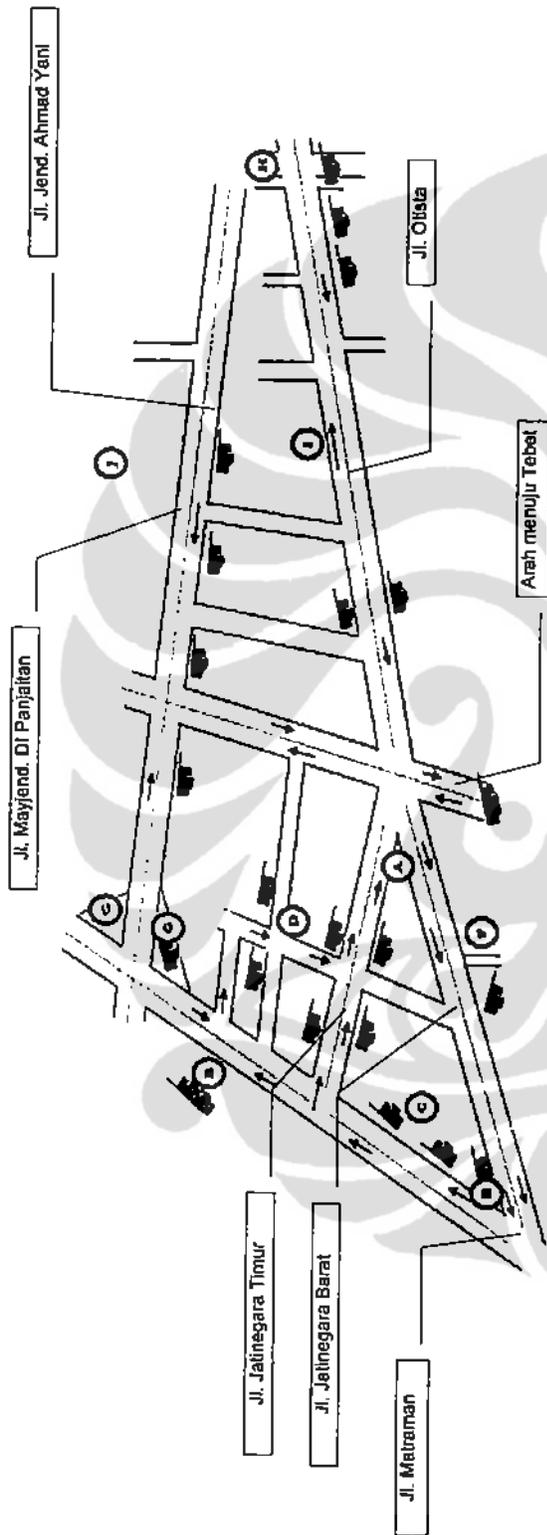
Manusia gerobak: suatu..., Abdul Ghofur, FISIP-UI, 2008

1.6.5 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini secara faktual menunjukkan beberapa kelemahan, terutama dari pengambilan datanya. Beberapa hal yang direncanakan sebelumnya menemui kendala-kendala pada pelaksanaan sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal seperti yang diharapkan. Awalnya, informasi juga akan diperoleh dari aparat pemerintah kelurahan dan kecamatan dan juga tramtib. Tetapi kenyataannya tidak ada data dari mereka langsung yang dapat diintegrasikan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena ketidakmauan mereka dalam memberikan informasi dengan alasan surat izin. Selain itu mereka tidak memiliki data dan informasi yang cukup, selain pandangan mereka penduduk liar yang dianggap melanggar.

Selain rencana penelitian tidak berjalan sebagaimana keinginan awal, data yang diperoleh dari informan pun tidak sama tingkat kedalamannya. Dari 12 rumah tangga manusia gerobak yang berhasil diwawancarai, dan beberapa informan lain, tidak semua informan menceritakan secara lengkap dan mendalam mengenai kisah hidup dan pandangan mereka. Di antara informan pun seringkali menyampaikan jawaban-jawaban singkat dan normatif. Tingkat kedalaman data yang diperoleh dari informan pun menjadi sangat beragam, pada tema-tema tertentu mereka mengungkap, namun pada tema lain informasi yang digali tidak muncul. Situasi ini menjadikan kesulitan tersendiri bagi peneliti, terutama dalam analisis dan proses penulisan.

Secara jujur harus diakui bahwa keberadaan peneliti kurang menyatu dengan kehadiran diri dan lokasi-lokasi manusia gerobak. Sepertinya peneliti hadir masih sebagai orang asing, yang hanya mengeksploitasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Pengalaman menjadi informan bukanlah yang pertama bagi mereka, dan saat wawancara dan laporan selesai, mereka biasanya ditinggal. Pengalaman itu (mungkin) membuat mereka lebih pasif. Meski demikian beberapa rumah tangga pemulung telah memandang peneliti sebagai teman karena sering berjumpa.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber: Peta Jakarta diolah dengan hasil observasi

Keterangan Gambar:

- A : Terminal Kampung Melayu
- B : Stasiun Jatinegara
- C : Pasar Jatinegara
- D : Jembatan Item
- E : Gereja Katolik
- F : RSIA Hermina
- G : Taman Viaduck dan Waduet
- H : Kolong Tol Cawang
- I : Gelanggang Remaja
- J : Kantor Kecamatan Jatinegara